

RINGKASAN PUBLIK

PT. ASIA TANI PERSADA



Kantor :
Graha Akasia
Jl. Arteri Supadio, Dusun Banjar Raya
RT.004 RW.008, Desa Sungai Raya Dalam
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
Propinsi Kalimantan Barat, 78391

2026

I. PENDAHULUAN

A. Profil Perusahaan

Nama Unit Manajemen	PT. Asia Tani Persada (ATP)
Alamat Unit Manajemen	Graha Akasia, Jl. Arteri Supadio, Dusun Banjar Raya, RT.004 RW.008, Desa Sungai Raya Dalam, Kec Sungai Raya, Kab Kubu Raya, Kalbar, 78391
Lokasi Unit Manajemen	Provinsi Kalimantan Barat Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang
Nomor SK Konsesi IUPHHK	SK Menteri Kehutanan No. 353/Menhut-II/2010 tanggal 31 Mei 2010
Nomor SK Konsesi PBPH	SK .1054/MENLHK/SETJEN/PHL.0/11/2021 tanggal 15 November 2021
Luas	20.748,84 Ha

A. VISI, MISI, SERTA KEBIJAKAN PERUSAHAAN

PT. ATP memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan tanaman secara lestari yang dituangkan dalam Visi, Misi dan Kebijakan Perusahaan

Visi :

”Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan sebagai satu kesatuan ekosistem secara profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial”.

Misi :

1. Menyelenggarakan usaha di bidang usaha hutan tanaman dengan menggunakan teknologi tepat guna yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional.
2. Meningkatkan mutu lingkungan hidup dengan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistem.
3. Melakukan perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya melalui pengelolaan sumber daya hutan sesuai kondisi spesifik ekosistemnya.
4. Mendorong manfaat ekonomi dan peran serta bagi kehidupan masyarakat setempat serta berperan dalam peningkatan ekonomi daerah dan nasional.

Kebijakan Lingkungan

PT. Asia Tani Persada (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen lingkungan, Perusahaan menjalankan pengelolaan hutan lestari dengan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Penerapan Kebijakan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional Perusahaan
2. Mendukung perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di area konsesi Perusahaan.
3. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan standar lainnya untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
4. Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
5. Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
6. Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku.
7. Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang diproduksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.
8. Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampak kebakaran.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan komitmen terhadap lingkungan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Lingkungan.

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PT. Asia Tani Persada (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen sosial, Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang berada di sekitar konsesi Perusahaan.

Penerapan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Melakukan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- Melakukan penilaian dampak sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar operasional melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Meminimalkan dampak lingkungan dalam kegiatan operasional bisnis.
- Menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan, dan melindungi data serta privasi pelanggan. Perusahaan memberikan perlindungan terhadap tindakan balasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Menerapkan standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Perusahaan mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan dan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Kelestarian Sosial

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

PT. Asia Tani Persada (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen terkait keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, Perusahaan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung.

Perusahaan juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda, sehingga seluruh pekerja dan perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan

Penerapan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3.

- Menerapkan Sistem Manajemen K3 - SMK3 Indonesia, Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional – ILO.
- Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai.
- Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait K3 dalam kegiatan operasional Perusahaan secara aktif.
- Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS*, Tuberkulosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS*, TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
- Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
- Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
- Melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis, termasuk pemasok untuk berkomitmen terhadap K3.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

Kebijakan Produksi

Dalam rangka menjamin produksi yang berkesinambungan (*sustainable*) maka perusahaan memperhatikan seluruh tahapan kegiatan dimulai dari kegiatan pembukaan wilayah hutan, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman dan pemanenan kayu sebagai tahapan dalam kegiatan produksi.

Perusahaan juga menjamin bahwa:

- Hasil hutan kayu dapat diketahui asal usulnya secara legal dengan prinsip lacak balak (CoC).
- Hasil hutan kayu yang dipanen tidak melanggar hak masyarakat adat dan sipil.
- Hasil hutan kayu yang dipanen mempertimbangkan nilai konservasi tinggi (HCV) dan nilai karbon tinggi (HCS).

- Penanaman tidak menggunakan bibit/ benih yang berasal dari rekayasa genetik (GMO).
- Aktifitas kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan ILO *Core Conventions (Human Rights)*.

Untuk memperkecil dampak lingkungan dan sosial maka perusahaan akan melakukan:

- Membuat perencanaan PWH, PAK dan seluruh tahapan produksi yang mempertimbangkan kelestarian kawasan lindung dan jenis flora fauna yang dilindungi.
- Membuat perencanaan kegiatan pemanenan kayu dan monitoring evaluasi penerapannya.
- Menjamin ketersediaan sarana prasarana produksi sesuai dengan aspek legalitas.
- Memastikan dokumen pergerakan kayu sesuai dengan aturan tata usaha kayu yang berlaku.
- Memastikan ketersediaan benih/ bibit yang bukan berasal dari rekayasa genetik (GMO).
- Memastikan kebijakan produksi ini disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan, kontraktor, masyarakat dan *stakeholder* yang lain.

Kebijakan Hak Asasi Manusia

1. Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia

PT Asia Tani Persada (selanjutnya disebut Perusahaan) menyadari tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia di seluruh operasional kami, sebagaimana ditetapkan dalam *International Bill of Human Rights* dan prinsip-prinsip tentang hak-hak dasar dalam delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization/ ILO*) yang tertuang dalam Deklarasi *ILO* tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja. Kami berkomitmen untuk menghormati hak-hak para pekerja dan masyarakat di sekitar operasional kami serta para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UN GPs on BHR*).

Pekerja Perusahaan:

- 1.1 Kami mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi *ILO* tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- 1.2 Kami tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- 1.3 Kami mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Kami memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
- 1.4 Kami mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.

- 1.5 Kami menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi *ILO* tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi. Kami berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja baik secara langsung, maupun tidak langsung melalui serikat pekerja.
- 1.6 Kami tidak menoleransi segala bentuk kerja paksa dalam operasional kami. Hal ini secara tegas berarti bahwa tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.
- 1.7 Kami mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah kami beroperasi.
- 1.8 Kami mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di wilayah kami beroperasi.
- 1.9 Kami menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan di wilayah operasional kami.
- 1.10 Kami menyediakan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja kami.
- 1.11 Kami memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerja kami melalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- 1.12 Kami menghormati privasi pekerja kami dan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan (*Company Business Code of Conduct/BCOC*) dan 10 prinsip yang ditetapkan *United Nations Global Compact*.

Pemasok Perusahaan

- 1.13 Kami mewajibkan pemasok kami untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan (*Supplier Code of Conduct/SCOC*).

Komunitas dan Masyarakat Adat

- 1.14 Kami menyadari pentingnya hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi *ILO* Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adat (*Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)*).
- 1.15 Kami menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.

2. Pendekatan Perusahaan

Pendekatan yang diimplementasikan Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia berpedoman pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UN GPs on BHR*):

- 2.1 Kami mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan serta kelompok yang berpotensi terdampak terutama kelompok yang rentan terdampak, melalui pelatihan dan diskusi.
- 2.2 Kami melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi kami.
- 2.3 Sepanjang proses uji tuntas kami, organisasi yang kami tunjuk melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membantu kami mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak kami dengan lebih baik.
- 2.4 Kami menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak hak asasi manusia yang mungkin telah kami sebabkan atau berperan di dalamnya.
- 2.5 Kami mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran melalui mekanisme penanganan keluhan atau berpartisipasi dalam mekanisme penanganan keluhan.
- 2.6 Kami mendukung proses hukum, apabila diperlukan untuk memulihkan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran kami.
- 2.7 Kami tidak menoleransi kekerasan apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

3. Tata Kelola

- 3.1 Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan pemasok Perusahaan di Indonesia.
- 3.2 Aturan yang diterapkan di seluruh operasional kami berasal dari ketentuan dalam Kebijakan ini.
- 3.3 Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan implementasi Kebijakan ini, kami melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progresnya.
- 3.4 Divisi *Sustainability* ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia sehari-hari sesuai dengan Kebijakan ini. Perusahaan secara berkala meninjau progres implementasi Kebijakan ini.
- 3.5 Kami melaporkan progres penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan kami dengan berbagai cara diantaranya melalui publikasi, forum pemangku kepentingan, dan webinar.

Kebijakan ini untuk lebih menjelaskan komitmen Perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia di seluruh operasionalnya sebagaimana tertuang dalam Komitmen Keberlanjutan (*Sustainability Commitment*).

II. KONDISI UMUM PT. ASIA TANI PERSADA

A. Gambaran Umum

Tabel II-1. Gambaran Letak Areal Konsesi PT. ATP

No	Uraian	Diskripsi Letak
1.	Geografis	109° 54' 17" BT -110° 13' 17" BT dan 0° 30' 38" LS - 0° 39' 59" LS
2.	Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat
3.	Pemangkuan Hutan	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Kabupataen : Ketapang• Dinas Propinsi : Kalimantan Barat
4.	Kelompok Hutan	Durian Sebatang
4.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Sungai Simpang Tiga

Topografi pada kawasan IUPHHK-HTI PT. ATP termasuk dalam kelas lereng A (datar) seluas 20.542 ha (99%) dan C (agak curam) seluas 198 ha (,1%).

B. Tata Ruang

PT. ATP telah menyusun dokumen perencanaan, yaitu: Dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 yang telah disetujui sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6076/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.

Tata ruang HTI dalam RKUPHHK-HTI PT ATP mengalami perkembangan tersaji pada Tabel 1.1.

Tabel II-2. Perkembangan Tata Ruang PT ATP

No	Peruntukan	RKUPHHK-HTI periode 2011-2020 (SK.182/VI-BPHT/2010)		RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 (SK.6142/MenLHK - PHPL/UHP/HPL.1 /2017)		RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 Tahun kegiatan 2018 – 2019 (SK.8504/MenLHK - PHPL/UHP/HPL.1 /9/2018)		Revisi RKU RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026		Keterangan
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
1	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	2.183	10,53	9.461,51	45,60	3.673,59	17,71	3.586,96	17,29	* Areal puncak kubah gambut total seluas ± 3.266,66 Ha tersebar pada : a. KPPN seluas ± 483,70 Ha. b. KPSL seluas ± 911,86 Ha. c. Sempadan sungai seluas ± 253,42 Ha. d. Areal Puncak Kubah Gambut eks TP dan TK seluas ± 1.617,68 Ha.
	a. KPPN	810	3,91	490,76	2,37	490,76	2,37	490,76	2,37	
	b. KPSL	1.162	5,60	1.055,30	5,09	1.055,30	5,09	1.088,12	5,24	
	c. Sempadan Sungai	211	1,02	390,4	1,88	390,40	1,88	390,40	1,88	
	c. Puncak Kubah Gambut *	-	-	7.525,05	36,27	1.737,13	8,37	1.617,68	7,80	
2	Areal Tanaman Pokok	13.868	66,87	6.785,49	32,70	11.936,48	57,53	11.937,15	57,53	
3	Areal Tanaman Kehidupan	1.629	7,85	4.501,84	21,70	5.138,77	24,77	5.224,73	25,18	
4	Areal Tanaman Unggulan	2.075	10,00							
5	Areal Tidak Efektif	985	4,75							
Luas Areal IUPHHK-HTI		20.740	100,00	20.748,84	100,00	20.748,84	100,00	20.748,84	100,00	

C. Penentuan Jenis Tanaman

Penentuan jenis tanaman yang dikembangkan dalam rangka pembangunan hutan tanaman terutama didasarkan pada beberapa hal, antara lain: 1) produktivitas tinggi atau cepat tumbuh (*fast growing*), 2) kegunaan (*uses*), dan 3) tempat tumbuh sesuai (*site matching*). Dengan demikian jenis-jenis yang akan dikembangkan PT ATP merupakan jenis-jenis yang memenuhi persyaratan kelayakan sebagai berikut:

1. Layak Industri; kesesuaian jenis hutan tanaman yang terkait dengan tujuan penggunaan bahan baku bagi industri yaitu produksi bahan baku pulp dan kertas.
2. Layak Manajemen; yaitu suatu jenis yang memiliki produktivitas tinggi tetapi dengan daur yang relatif pendek.
3. Layak Tumbuh; suatu jenis yang memiliki kecocokan tinggi untuk dapat ditumbuh-kembangkan pada kondisi kendala ekologis setempat dan input rekayasa yang dimungkinkan.

Sesuai dengan tujuan pembangunan hutan tanaman yang dituangkan revisi RKUPHHK-HTI PT ATP yaitu rehabilitasi sumberdaya hutan untuk menghasilkan yang dapat dan mendukung pasokan bahan baku industri pulp, sehingga jenis tanaman yang dipilih adalah tanaman yang dapat menjadi bahan baku pulp (*fiber*). Kesesuaian lahan diperoleh dengan kajian silang antara jenis tanaman dan kelas lahan (*species site matching*), dari kajian tersebut perusahaan dapat memilih jenis tanaman untuk memenuhi persyaratan bahan baku pulp dan sesuai dengan syarat tumbuh pada lahan yang tersedia. Kajian tersebut terus dilakukan untuk memperoleh jenis tanaman yang benar-benar sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Disamping itu pula dikaji upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesesuaian lahan terhadap jenis tanaman

yang sedang dikembangkan. Berdasarkan nilai ekonominya, diusahakan jenis tanaman yang memiliki nilai jual yang dapat mendukung kelestarian usaha PT. ATP. Berdasarkan beberapa kriteria tersebut diatas, maka jenis tanaman pokok yang dikembangkan saat ini adalah *Acacia crassicarpa*

D. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Tabel II-3. Daftar satwa yang dilindungi yang berada di areal Kerja PT. ATP berdasarkan status perlindungan jenis fauna (PP 7/1999, CITES dan Redlist IUCN).

1. Daftar Jenis Mammalia

No.	Nama	Nama Latin	Aktivitas		Status			Pengamatan
			D	N	PP No.7/99	IUCN	CITES	
KARNIVORA								
1	Beruang	<i>Helarctos malayanus</i>	√	√	L	VU	App I	i
2	Kucing Hutan	<i>Prionailurus planiceps</i>	√	√	L	EN	-	j
3	Macan Akar	<i>Neofelis nebulosa</i>	√	√	L	VU	App I	j
4	Munsang	<i>Viverra zangueana</i>		√				i
5	Berang-Berang	<i>Lutra lutra</i>	√	√				i
INSECTIVORA								
6	Landak	<i>Hystrix brachyuran</i>	√	√	L	LC	App II	i
7	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>	√	-	L	EN	App II	i
8	Kelelawar	<i>Hipposideros larvatus</i>		√				p
HERBIVORA								
9	Babi hutan	<i>Sus barbatus</i>	√	√	-	VU	-	j
10	Kera	<i>Macaca nemestrina</i>	√	-	-	VU	App II	p
11	Lempiang	<i>Hylobates muelleri</i>	√	-	-	EN	App I	ps
12	Orang utan	<i>Pongo pygmaeus</i>	√	-	L	EN	App I	j
13	Pelanduk	<i>Tragulus javanica</i>	√	-	L	DD	App II	i
14	Rusa	<i>Cervus unicolor</i>	√	√	-	VU	-	i
15	Tupai	<i>Tupaia splendidula</i>	√	-	-	LC	App II	p
16	Kalong	<i>Pteropus Allernorum</i>		√				i

2. Daftar Jenis Aves (Burung)

No.	Nama	Nama Latin	Status			Pengamatan
			PP No.7/99	IUCN	CITES	
1	Betet	<i>Psittacula alexandri</i>	L	NT	App II	i
2	Elang	<i>Spizaetus nanus</i>	L	-	-	p
3	Gagak	<i>Corvus corax</i>	-	LC	-	ps
4	Kabit kapan	-	L	-	-	p
5	Merbak tanah	<i>Lanius cristatus</i>	-		-	ps
6	Pelatuk	<i>Mulleripicus pulverulentus</i>	-	VU	-	p
7	Punai	<i>Treron olax</i>	L	LC	-	i
8	Tiung / Beo	<i>Gracula religiosa</i>	L	LC	-	i
9	Murai batu	<i>Copsychus malabaricus</i>	L	LC	-	ps
10	Cucak hijau	<i>Chloropsis sonnerati</i>	-	LC	-	ps

11	Burung hantu	<i>Ninox connivens</i>	-	LC	App II	i
12	Bubut	<i>Centropus bengalensis</i>				ps
13	Kaca mata	<i>Zosterops palpebrosus</i>	-			p
14	Kacer	<i>Copsychus pluto</i>				ps
15	Keruak (Ruak)	<i>Amaurornis phoenicurus</i>				ps
16	Madu	<i>Anthreptes malacensis</i>				ps
17	Perenjak	<i>Prinia flaviventris</i>				ps
18	Rangkong/Enggang	<i>Buceros rhinoceros</i>	L	NT	App II	ps
19	Sri gunting	<i>Dicrurus macrocercus</i>				ps
20	Tung Tung	<i>Megalaima oorti</i>				ps
21	Tekukur	<i>Streptopelia chinensis</i>				i
22	Kuntul	<i>Egretta garzetta</i>				i
23	Kapas	<i>Alophoixus bres</i>				i
24	Walet	<i>Apus apus</i>				i
25	Layang-layang	<i>Hirundo rustica</i>				i

3. Daftar Jenis Reptil

No.	Nama	Nama Latin	Status			Pengamatan
			PP No.7/99	IUCN	CITES	
1	Buaya	<i>Crocodylus porosus</i>		LC	App I	i
2	Kura-kura	<i>Cuora amboinensis</i>		VU		i
3	Labi-labi	<i>Dogania subplana</i>		LC		i
4	Ular Cobra	<i>Ophiophagus hannah</i>		VU	App II	i
5	Ular sawah	<i>Python molurus</i>		VU	App II	i
6	Ular lidi	<i>Xenochrophis vittatus</i>	-	-	-	i
7	Ular Hijau	<i>Ahaetulla prasina</i>				p
8	Tokek	<i>Gekko smithii</i>		LC	-	ps
9	Kadal	<i>Mabuya multifasciata</i>	-	-	-	i
10	Biawak	<i>Varanus albigularis</i>		-	-	i

4. Daftar Flora yang dilindungi

Penentuan jenis-jenis pohon dilindungi didasarkan pada beberapa kepentingan seperti keberadaan jenis pohon, status pohon tersebut dan beberapa kriteria lainnya termasuk pohon penghasil nir kayu, sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan & Perkebunan No.692/Kpts-II/1998.

No.	Kelompok Jenis	INP (%)	Status		
			KepMenhutbun No.692/Kpts-II/1998	IUCN	
1	Ramin	Semai	-	L	ED
		Pancang	-		
		Tiang	-		
		Pohon	7.09		
2	Kayu Ara	Semai	-	L	-
		Pancang	-		
		Tiang	-		
		Pohon	3.69		
3	Durian Burung	Semai	-	L	-
		Pancang	-		

		Tiang	-		
		Pohon	1.07		
4	Jelutung	Semai	-	L	LC
		Pancang	3.67		
		Tiang	4.11		
		Pohon	11.67		
5	Kempas	Semai	-	L	LC

E. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Desa-desanya di areal IUPHHK-HT PT ATP yaitu Desa Kualan Hilir luasnya 215.20 Km² atau 6.78% dari luas keseluruhan Kecamatan Simpang Hulu, Desa Labai Hilir luasnya 198.05 km² atau 6.24 % sedangkan Desa Sekucing Kualan luasnya 187.20 Km² (5.90%). Desa Kualan Hilir berpenduduk sekitar 3.031 jiwa dan 750 KK dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 14 jiwa/Km², tersebar di 3 dusun, 21 RT. Desa Labai Hilir berpenduduk sekitar 1.399 jiwa dan 344 KK dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 8 jiwa/Km² tersebar di 2 Dusun 5 RT. Sementara itu Desa Sekucing Kualan dihuni oleh sekitar 863 jiwa dan 323 KK dengan tingkat kepadatannya sekitar 8 jiwa/Km², tersebar di 3 dusun, 8 RT. Data profil desa di sekitar areal IUPHHK-HT PT ATP dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-4. Penduduk, agama, mata pencaharian, dan fasilitas umum di dalam dan sekitar areal kerja

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah penduduk			
	Laki-laki	orang	2.833	Tersebar di 3 desa
	Perempuan	orang	2.460	Tersebar di 3 desa
	Angkatan Kerja 15 -54 Tahun	orang	58.23 %	
	Tidak Produktif <15 - >55 Tahun	orang	41.77 %	
2.	Agama dan Aliran Kepercayaan			
	Islam	%	10,0	
	Protestan & Katholik	%	80.0	
	Hindu & Budha	%	10.0	
3.	Mata Pencaharian			
	Petani	%	80,0	Petani ladang & karet
	Lain-lain	%	10,0	
4.	Fasilitas Pendidikan			
	TK	Unit	5	Lokasi : Kecamatan Simpang Hulu
	SD	Unit	36	
	SLTP	Unit	5	
	SLTA dan SMK	Unit	2	
	Perguruan Tinggi	Unit	0	
	Lain-lain	Unit	0	
5.	Sarana Kesehatan			
	Puskesmas	Unit	1	Kecamatan Simpang Hulu
	Puskesmas Pembantu	Unit	7	
	Poskesdes	Unit	1	
	Polindes	Unit	8	
	Posyandu	Unit	18	

Sumber: Kecamatan Simpang Hulu Dalam Angka 2012, (diolah)

Sebagian besar penduduk bergantung pada bidang usaha perikanan, pertanian rakyat, perkebunan, perikanan dan industri hasil hutan. Sebagian kecil masyarakat sekitar menggantungkan hidupnya pada usaha perdagangan, transportasi, nelayan, jasa pelayanan masyarakat dan pegawai instansi pemerintah. Alternatif pemilihan lapangan usaha penduduk tersebut sangat terkait dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki, ketersediaan sumber daya alam di sekitarnya.

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PT. ATP

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. ATP dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

A. ASPEK PRODUKSI

1. Perencanaan

Dasar kegiatan operasional PT. ATP adalah Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK-HTI ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

2. Penataan Batas

PT. ATP wajib melaksanakan tata batas di areal kerja. Untuk itu tata batas akan dilaksanakan dengan arahan dan bimbingan dari Badan Planologi Kehutanan (BAPLAN). Kegiatan penataan batas di areal PT ATP diawali dengan Permohonan, pembuatan trayek batas dan pedoman tata batas areal. Berdasarkan pada pengukuran planimetris areal kerja PT Asia Tani Persada, penataan batas dilakukan sepanjang $\pm 92,14$ km berupa batas buatan yang merupakan batas persekutuan dengan unit manajemen lain.

Tabel III-1. Penataan Batas

No	Uraian	Panjang Batas		Keterangan
		Km	%	
1	Batas Alam (sungai, dan lain-lain)	-	-	
2	Batas Buatan:			
	a. Batas Sendiri	-	-	
	b. Batas Persekutuan			
	(1) PT MTI	23,64	25,66	Lap TBT No. Lap.27/BPKH.III-2/2014
	(2) PT Mayawana Persada	60,96	66,16	Lap TBT No. LP.05/BPKH.III-2/2015
	(1) PT Asia Tani Persada	7,54	8,18	Lap TBT No. LP.05/BPKH.III-2/2015
	Total	92,14	100,00	

3. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana

PT. ATP melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan kanal dan jalan, base camp, dan sarana prasarana lainnya.

4. Pembibitan

Pengadaan bibit diperlukan untuk kegiatan penanaman dengan kualitas yang baik dan diperlukan adanya jumlah atau kuantitas bibit yang cukup untuk kebutuhan penanaman termasuk persediaan untuk penyulaman. Selain penanaman tanaman pokok, juga akan dilakukan penanaman pada areal pengembangan tanaman unggulan dan kawasan lindung dengan penutupan lahan berupa lahan kosong dan semak belukar, serta areal tanaman kehidupan. Penanaman pengayaan pada Kawasan lindung dan pengembangan tanaman unggulan yang masih berhutan dilakukan setelah dilakukan inventarisasi tegakan, untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan kegiatan pengayaan. Jumlah bibit yang dibutuhkan tergantung pada: 1) luas tanaman, 2) jarak tanam, 3) factor kerusakan dalam persemaian dan saat pengangkutan bibit ($\pm 5\%$), dan 4) factor kematian di areal penanaman ($\pm 20\%$).

5. Penyiapan lahan dan Pemanenan

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai tujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan di PT. ATP menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

6. Penanaman

Kegiatan penanaman di areal hutan tanaman PT. ATP dilakukan setelah kegiatan penyiapan lahan selesai dan dinilai layak untuk diteruskan dengan kegiatan penanaman. Penanaman dimungkinkan dilakukan sepanjang tahun karena kondisi curah hujan yang sesuai. Pelaksanaan kegiatan penanaman dimonitor melalui kegiatan Plantation Process Assessment (PPA) yang dilaksanakan oleh Departemen Plantation Control (PC) agar kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Selain itu untuk melihat keberhasilan tanaman dilakukan *Plantation Assessment* oleh *Plantation Assessment Team* (PAT) untuk menilai standar stocking, spacing, dan weed free. Kegiatan ini dilakukan pada saat tanaman berumur 2, 6, 12, 24 dan 36 bulan.

7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI.

B. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. ATP yaitu berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 711 Tahun 2009 tanggal 2 Desember 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan UPHHK-HTI oleh PT. ATP.

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Dalam Dokumen RKU PT ATP telah mengalokasikan KL seluas 2.183 ha (10,53%). Jenis KL di areal kerja PT. ATP meliputi kawasan sempadan sungai seluas 211 ha (1,02%), KPPN seluas 810 ha (3,91%) dan DPSL seluas 1.162 ha (5.60%).

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis flora dan fauna yang tersebar di sekitar areal berhutan. Di antara flora dan fauna tersebut teridentifikasi jenis-jenis yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT. ATP sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh PT. Ekologika Consultants. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Hasil Identifikasi HCV PT. ATP

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 1 – Keanekaragaman Hayati Penting	1.1	Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (viable population).	ADA
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	TIDAK ADA
NKT 2 – Lanskap & Dinamika Alamiah	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	TIDAK ADA
	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	ADA
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	ADA
NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah	3	Ekosistem langka atau terancam punah	ADA
NKT 4 – Jasa Lingkungan	4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	ADA
	4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	TIDAK ADA
	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan	ADA
NKT 5 –Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat	5	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	ADA

4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung, tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (klaim dan konversi lahan).

C. ASPEK SOSIAL

1. Pembangunan Sosial Masyarakat

Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

2. Kondisi dan Permasalahan Sosial Masyarakat

Bentuk konflik yang terjadi di PT. ATP berupa konflik lahan kategori 4 (Pemenuhan Kebutuhan Hidup).

IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2025

Monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

A. ASPEK PRODUKSI

1. Pembibitan

Pengadaan bibit diperlukan untuk kegiatan penanaman dengan kualitas yang baik dan diperlukan adanya jumlah atau kuantitas bibit yang cukup untuk kebutuhan penanaman termasuk persediaan untuk penyulaman. Selain penanaman tanaman pokok, juga akan dilakukan penanaman pada areal pengembangan tanaman unggulan dan kawasan lindung dengan penutupan lahan berupa lahan kosong dan semak belukar, serta areal tanaman kehidupan. Penanaman pengayaan pada kawasan lindung dan pengembangan tanaman unggulan yang masih berhutan dilakukan setelah dilakukan inventarisasi tegakan, untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan kegiatan pengayaan. Jumlah bibit yang dibutuhkan tergantung pada: 1) luas tanaman, 2) jarak tanam, 3) faktor kerusakan dalam persemaian dan saat pengangkutan bibit ($\pm 5\%$), dan 4) faktor kematian di areal penanaman ($\pm 20\%$).

Tabel IV-2. Rencana dan Realisasi Pembibitan PT. ATP Tahun 2025

Tahun RKT	Pembibitan		Persentase
	Target (Batang)	Realisasi (Batang)	
2025	4.281.847,00	4.292.032,00	100,33 %

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

2. Penyiapan Lahan dan Penanaman

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai tujuan untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan PT. ATP menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar.

Tabel IV-3. Rencana dan Realisasi Penanaman Tanaman Pokok Tahun 2025

Tahun RKT	Penanaman		Persentase
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	
2025	2.141,78	1.559,7	72,82%

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

Kinerja atau performa penanaman di areal kerja PT. ATP bila dilihat berdasarkan data RKT 2025 Realisasi yang mencapai 72,82% dari target yang ditetapkan jika dibandingkan terhadap realisasi tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hal yang masih menjadi tantangan adalah pertama, Keberadaan kontraktor penebangan hanya 1 (satu) dan jumlah alat kurang. Kedua, kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi, sehingga kondisi infrastruktur jalan lebih cepat rusak.

3. Pemeliharaan Tanaman

PT. ATP Mempunyai beberapa kegiatan pemeliharaan tanaman baik pada tingkat persemaian maupun aplikasi di lapangan setelah penanaman.

Tabel IV-4. Tabel Pemeliharaan Tanaman tahun 2025

Jenis Kegiatan	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Periode
Pemupukan	2.141,78	3.453,60	Januari Desember
Penyulaman	2.141,78	2.503,30	Januari Desember
Penyiangan Manual	-	-	Januari Desember
Penyiangan Chemis	-	-	Januari Desember
Singling	-	-	Januari Desember

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

4. Pemanenan (Harvesting)

Kinerja atau performa pemanenan di areal kerja PT. ATP bila dilihat berdasarkan data realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk ke depannya perlu suatu monitoring dan evaluasi dari setiap target agar capaian realisasi tidak meleset.

Tabel IV-5. Rencana dan Realisasi Pemanenan (2025)

Rencana dan Realisasi Pemanenan				
Tahun RKT	Keterangan	Rencana	Realisasi	Presentase
2025	Volume (m3)	177.241,03	130.935,21	73,87%

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

5. Lacak Balak/Chain of Custody (CoC)

Sebagai perusahaan hutan tanaman industri PT. ATP berkomitmen untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersumber dari pengelolaan hutan secara lestari yang diproduksi dari material tanam Non-GMO dengan berdasarkan atas prinsip-prinsip lacak balak kayu (CoC).

B. ASPEK EKOLOGI

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT ATP meliputi pengelolaan kawasan lindung, flora dan fauna dilindungi, pengelolaan tanah dan air serta pengamanan dan perlindungan hutan. Kegiatan tersebut disajikan pada table berikut.

Tabel IV-6. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkungan/Ekologi Tahun 2025

No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
Pengelolaan Lingkungan					
A. Kawasan Lindung					
1	Survey HCVF	HTI, Kawasan Lindung (KPPN, sempadan sungai) & Desa	1 x	1 x	Untuk survey HCVF sudah selesai dilaksanakan dan laporan sudah selesai.
2	Pemasangan dan Perawatan papan larangan berburu.	Konsesi & Batas	1 pc	1 pc	Untuk pemasangan dan perawatan papan larangan perburuan sudah terpasang
3	Sosialisasi Masyarakat (MPA)	Desa Binaan	2 x	2 x	Sosialisasi terhadap Masyarakat Peduli Api dilaksanakan 1x dalam 1 tahun.
4	Pemasangan & Perawatan signboard HCV-HCS	KPPN dan Sempadan Sungai	6 Pc	6 Pc	Untuk pemasangan dan perawatan signboard HCV-HCS sudah terpasang sesuai dengan perencanaan
5	Pemeliharaan Batas Kawasan Lindung	KL KPPN dan sempadan sungai, Buffer zone, cagar budaya	6 km	6 km	sesuai dengan rencana
a. Vegetasi Dilindungi					
1	Survey Vegetasi	KPPN	1 x	1 x	Dilaksanakan 1x dalam setahun
2	Sosialisasi	Desa tempatan	1 x	1 x	Sosialisasi dilaksanakan berbarengan dengan sosialisasi terpadu dengan Masyarakat Desa Binaan.
b. Satwa dilindungi					
1	Pemasangan papan informasi satwa dilindungi, dan larangan berburu	KPPN, Area produksi	1 pc	1 pc	Di pasang di Kawasan Lindung KPPN/ Produksi
2	Sosialisasi Larangan Berburu dan satwa yang dilindungi.	Desa tempatan, camp	1 x	1 x	Sosialisasi dilaksanakan saat berbarengan dengan sosialisasi terpadu ke pada masyarakat tempatan/ binaan.
B. Tanah dan Air					

1	Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida	Nursery	Harian	Setiap Hari	Untuk pemakaian pupuk dan herbisida disesuaikan dengan rekomendasi standar yang berlaku.
2	Penanganan limbah B3	Gudang Limbah B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan semesteran 1 x dalam 3 bulan.
3	Sosialisasi B3	Kantor distrik, camp kontraktor	All karyawan & Kontraktor	All karyawan & Kontraktor	Untuk sosialisasi terkait penanganan Limba B3 di laksanakan pada setiap karyawan & kontraktor petugas gudang, Genset, nursery dan Plantation.
C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan					
1	Patroli	Seluruh konsesi	365 hari	365 hari	Untuk Patroli dilaksanakan setiap hari oleh security & karyawan
2	Pelatihan Kebakaran Hutan	Kantor Distrik	2 x	2 x	Untuk pelatihan kebakaran terhadap karyawan dan kontraktor.
No	Kegiatan	Lokasi	Rencana	Realisasi	Monev
Pemantauan Lingkungan					
A. Kawasan Lindung					
1	Pemantauan flora dan fauna, identifikasi flora dan fauna dilindungi	KPPN	6 jalur	6 jalur	Untuk pemantauan flora dan fauna dilaksanakan 1 x dalam satu tahun.
2	Monitoring Insidentil	Seluruh konsesi	Harian		
B. Tanah dan Air					
1	Pengambilan sample air sungai	Sungai dalam konsesi	2 x	2 x	RKL RPL
2	Pengukuran curah hujan	Kantor distrik	Harian	Setiap Hari	Dilaksanakan pada setiap hari.
3	Pencatatan Temperatur & Kelembaban	Kantor distrik	Harian	Setiap Hari	Dilaksanakan pada setiap hari.
4	Pemantaun limbah B3	Gudang B3	12 x	12 x	Untuk penanganan dan pelaporan dilakukan 1 x dalam 1 bulan dan dilaporkan ke instansi terkait dalam laporan dalam 3 bulan.
5	Pemantauan Subsidence Gambut	Mewakili tiap zona	2x	2x	Dilakukan 2x dalam setahun
6	Pemantauan <i>Water Level</i> dan <i>Water Table</i>	Mewakili tiap zona	12x	12x	Dilakukan setiap bulan
C. Pengamanan dan Perlindungan Hutan					
1	Patroli hutan	Seluruh konsesi	12 x	12 X	Untuk Patroli dilaksanakan setiap hari oleh security dan karyawan dan direkap dalam bentuk lapaoran 1x dalam satu bulan (Patroli Scurity, RPK, dan secara bersama)
2	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok & nursery	Harian	12 bulan	Untuk monitoring Hama & penyakit dilaksanakan setiap ada laporan tanaman terserang hama & penyakit.
3	Monitoring rawan kebakaran	Seluruh konsesi	Harian	Setiap Hari	Untuk patroli hal kebakaran dilaksanakan pada setiap hari.

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan oleh PT. ATP dengan melengkapi SOP, Pengadaan fasilitas kebakaran berupa mobil, selang, pompa air, APD dan peralatan lainnya serta memasang papan peringatan akan bahaya kebakaran hutan dan lahan di lokasi. PT. ATP juga melakukan simulasi kebakaran secara rutin dan cek alat pemadam kebakaran. Telah dibentuk satuan regu pemadam

kebakaran di perusahaan yang bertugas monitoring harian dari hotspot yang terindikasi adanya titik api dan patroli. Tidak adanya kegiatan illegal logging. Untuk tahun 2025 tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan illegal logging di areal PT. ATP.

C. ASPEK SOSIAL

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya.

Tabel IV-7. Rencana dan Realisasi Program CD-CSR PT. ATP Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Keterangan		
			Rencana	Realisasi	Prosentase
1	Bantuan Keagamaan	kali	2	1	50%
2	Bantuan Sosial	kali	2	3	150%
3	Bantuan Pendidikan	kali	1	0	0%
4	Bantuan Kesehatan	kali	2	0	0%
5	Bantuan Olahraga	kali	2	0	0%
6	Pertemuan Stakeholder	kali	1	0	0%
7	Penyusunan Kesepakatan	kali	1	0	0%
8	Mediasi	kali	1	0	0%
9	Saprodi Pertanian	kali	1	1	100%
10	Alat Mesin Pertanian	kali	1	0	0%
11	Adat dan Budaya	kali	2	0	0%
12	Perekonomian Rakyat	kali	2	0	0%
13	Infrastruktur	km	10	0	0%

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

Aspek kegiatan yang dilaksanakan meliputi peningkatan sumberdaya manusia, pembinaan sosial budaya, Sarana Kesehatan dan pembangunan prasarana desa. Seluruh jenis kegiatan dalam rencana operasional dilaksanakan tetapi realisasi biayanya tidak sama ada yang lebih banyak dan lebih sedikit dari rencana

operasional. Dalam pelaksanaan melibatkan Perangkat Desa (Kepala Desa), sehingga segala kebutuhan masyarakat yang paling dibutuhkan dapat dilaksanakan.

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2026

A. ASPEK PRODUKSI

Rencana kelola produksi berdasarkan rencan RKT tahunan, namun untuk RKT PT. ATP memiliki periode waktu pada bulan Januari-Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2026.

Tabel V-1. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2026

No	Parameter	Rencana
1	Pengadaan Bibit Di Nursery (Btg)	101.719,00
2	Tanam (Ha)	50,88
3	Tebang (Ha)	Tidak ada rencana
4	Produksi (M3)	Tidak ada rencana
5	Survey Permanen Sample Plot (PSP)	
	a. Jumlah Plot	Tidak ada rencana
	b. Luas (Ha)	-
6	Survey Pre Harvesting Inventory (PHI)	
	a. Jumlah Plot	Tidak ada rencana
	b. Luas (Ha)	-

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

Tabel V-2. Pemeliharaan Tanaman

Jenis Kegiatan	Target (Ha)	Periode
Pemupukan	50,88	Januari Desember
Penyulaman	50,88	Januari Desember
Penyiangan Manual	-	Januari Desember
Penyiangan Chemis	-	Januari Desember
Singling	-	Januari Desember

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

B. ASPEK EKOLOGI

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCVF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan HTI di PT. ATP dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta

pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan RO RKL RPL

Penyusunan dan pelaksanaan RO merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti: (1) Perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi; (2) Konservasi tanah dan air; (3) Menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan. Berikut disajikan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2026.

Tabel V-1. Rencana Kegiatan Lingkungan/ Ekologi Tahun 2026

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Tata Batas Kawasan Lindung	Km	6	
2	Rehabilitasi Kawasan Lindung	Ha	2	
3	Signboard	Unit	6	
4	Suksesi Alami HCV HCS	Ha	100	
5	Survei Biodiversity	Paket	1	
6	Pengukuran Plot PSP HCS	Unit	12	
7	Pemantauan Alert MDA/ LCCA	Paket	1	
8	Pemantauan Kualitas Air Sungai	kali	2	
9	Pemantauan Kualitas Udara	kali	2	
10	Pemantauan Persepsi Masyarakat	kali	2	
11	Pemantauan Kualitas Air Minum	kali	2	
12	Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran	Paket	Tiap hari	
13	Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar	kali	1	

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

A. Aspek Sosial

Tabel V-2. Rencana Kegiatan Aspek Sosial Tahun 2026

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Bantuan Keagamaan	kali	2	
2	Bantuan Sosial	kali	2	
3	Bantuan Pendidikan	kali	1	
4	Bantuan Kesehatan	kali	2	
5	Bantuan Olahraga	kali	2	
6	Pertemuan Stakeholder	kali	1	
7	Penyusunan Kesepakatan	kali	1	
8	Mediasi	kali	1	

Sumber: Dokumen RKTPH Tahun 2026

VI. PENUTUP

Ringkasan pengelolaan hutan PT. ATP disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang pengelolaan hutan yang ada di wilayah PT. ATP menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan pengelolaan hutan PT. ATP ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. ATP pada tahun 2025 dan rencana kegiatan untuk tahun 2026.

Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. ATP. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari produksi, ekologi dan sosial secara seimbang.